

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi dapat dipahami sebagai serangkaian tahapan yang berisi berbagai keputusan dan tindakan yang direncanakan secara matang serta terintegrasi satu sama lain. Dalam penyusunannya, strategi tidak hanya menekankan tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga menjelaskan metode, langkah kerja, dan cara pelaksanaan yang akan ditempuh. Umumnya, gagasan awal strategi dirumuskan oleh pimpinan atau manajemen puncak organisasi sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap arah kebijakan. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan strategi sangat bergantung pada keterlibatan seluruh unit, bagian, dan anggota organisasi yang bekerja bersama secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi tidak hanya sekadar rencana, tetapi juga panduan praktis yang mengarahkan seluruh sumber daya organisasi agar bekerja secara terkoordinasi. Dengan strategi yang jelas dan terstruktur, organisasi dapat menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan meminimalkan risiko yang muncul dalam operasional sehari-hari. Keberhasilan organisasi sangat

bergantung pada sejauh mana strategi tersebut diterapkan dengan tepat, konsisten, dan fleksibel menyesuaikan dinamika lingkungan. Dengan demikian, strategi menjadi fondasi penting yang menentukan efektivitas dan keberlanjutan kinerja organisasi dalam jangka panjang.¹⁵ Strategi merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Clausewitz menjelaskan bahwa strategi adalah seni dalam merencanakan dan menghadapi pertempuran untuk meraih kemenangan, menekankan pentingnya perhitungan dan penyesuaian terhadap situasi yang berubah-ubah. Namun, makna strategi tidak hanya terbatas pada konteks militer. Dalam kehidupan organisasi dan kepemimpinan, strategi berfungsi sebagai panduan untuk melaksanakan berbagai kegiatan penting secara terarah, terstruktur, dan efisien.

Dengan strategi, setiap langkah yang diambil dapat lebih fokus, terukur, dan selaras dengan tujuan jangka panjang. Strategi membantu pemimpin maupun anggota organisasi mengantisipasi tantangan, memanfaatkan peluang, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, penerapan strategi menjadi kunci keberhasilan baik dalam mencapai target organisasi maupun dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas kehidupan sehari-hari.¹⁶ Menurut Stephanie K. Marrus, strategi merupakan proses yang

¹⁵ Samsurijal Hasan, *Manajemen Strategi* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), 1.

¹⁶ Eddy Yunus, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), 11.

dijalankan oleh pemimpin tertinggi untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengaturan sumber daya secara terarah agar hasil yang diinginkan tercapai secara efektif dan efisien, sejalan dengan visi dan misi organisasi.¹⁷ Chandler menjelaskan bahwa strategi merupakan proses menyeluruh yang mencakup penetapan tujuan jangka panjang, menentukan target, melaksanakan langkah-langkah konkret, serta memanfaatkan sumber daya secara optimal, dengan tujuan akhir mencapai hasil yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mencapai visi dan sasaran organisasi.¹⁸ Dalam konteks ini, strategi dapat dipahami sebagai rencana jangka panjang yang memuat serangkaian langkah dan tindakan terencana. Rencana ini dirancang untuk mencapai tujuan dengan cara yang terarah dan efektif, sehingga setiap keputusan dan upaya yang dilakukan mendukung pencapaian hasil yang diinginkan secara maksimal.

2. Indikator Strategi

Strategi adalah rangkaian langkah terencana yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini menekankan efektivitas dan efisiensi, sehingga setiap tindakan memiliki arah jelas dan hasil yang diharapkan tercapai dengan cara yang terstruktur, terukur,

¹⁷ Ifadhila, *Strategi Perencanaan Sumber Daya Manusia: Menelolan Dan Menetapkan SDM Yang Berkualitas* (Jambi: sonpedia publishing indonesia, 2023),2.

¹⁸ Okki Kurnia, *Dasar Dasar Mannajemen 5.0* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2023),35.

dan optimal dalam setiap proses pelaksanaannya. Dalam praktiknya, strategi melampaui perencanaan formal tetapi juga bagaimana rencana tersebut diwujudkan dalam kehidupan sosial dan organisasi. Beberapa indikator utama keberhasilan strategi meliputi hal-hal berikut:

a. Menghargai

Rasa saling menghargai menjadi fondasi utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan efektif, baik di lingkungan organisasi maupun komunitas. Menghargai orang lain berarti mengakui keberadaan mereka, menghormati kontribusi yang diberikan, serta menerima perbedaan yang ada tanpa memandang latar belakang, posisi, atau status sosial. Sikap ini mendorong terciptanya komunikasi yang lebih terbuka, kerja sama yang lebih solid, dan iklim sosial yang nyaman bagi semua pihak. Dengan menghargai satu sama lain, konflik dapat diminimalkan, rasa percaya tumbuh, dan interaksi antarindividu menjadi lebih positif, membangun komunitas dan organisasi yang kuat serta inklusif. Dalam praktiknya, sikap ini tercermin dari perilaku yang santun, kemampuan untuk mendengarkan dengan sepenuh hati, dan menahan diri dari sikap menghakimi dalam setiap interaksi. Saat setiap anggota merasa dihargai dan didengar, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif serta memberikan kontribusi positif bagi kelompok. Rasa dihormati ini juga mendorong terciptanya suasana harmonis, di

mana komunikasi berjalan lancar dan konflik dapat diminimalkan. Dengan kata lain, menghargai anggota bukan sekadar etika sosial, tetapi juga strategi penting untuk memperkuat kerja sama, meningkatkan keterlibatan, dan menjaga stabilitas serta keharmonisan dalam setiap dinamika kelompok.¹⁹ Selain itu, rasa saling menghormati pula merupakan fondasi penting untuk membangun kolaborasi yang kuat dan memupuk kepercayaan timbal balik. Dengan menghormati orang lain, potensi perselisihan dan miskomunikasi yang timbul dari perbedaan perspektif atau latar belakang dapat diminimalkan.²⁰ Dalam sebuah organisasi, secara konsisten mempraktikkan rasa saling menghormati, setiap anggota merasa diterima dan dihormati. Hal ini dapat menciptakan suasana yang mendorong kreativitas dan meningkatkan produktivitas. Sejalan dengan Roma 12:10, yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi sebagai saudara dan menunjukkan rasa hormat terlebih dahulu, ayat ini menekankan bahwa rasa saling menghormati adalah fondasi penting untuk membangun hubungan yang harmonis dalam sebuah kelompok.

¹⁹ Enadarlita, "Strategi Pemimpin Sebagai Agen Perubahan Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi," *Jurnal prajaiswara* 1 no.2 (2020): 118.

²⁰ Ibid,188.

b. Membangun Ruang Komunikasi Terbuka dan Bebas Berpendapat

Ketika komunikasi bersifat terbuka, setiap anggota memiliki kesempatan yang setara untuk mengekspresikan gagasan, berbagi masukan, atau mengungkapkan kritik secara konstruktif tanpa rasa takut akan penolakan atau tekanan dari pihak lain. Lingkungan seperti ini mendorong partisipasi aktif, memperkuat rasa memiliki, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena semua perspektif dipertimbangkan. Selain itu, ruang komunikasi terbuka juga berperan dalam membangun kepercayaan antar anggota, memperkecil konflik internal, dan memfasilitasi kolaborasi yang lebih harmonis. Dengan kata lain, organisasi yang mampu menciptakan suasana komunikasi terbuka tidak hanya efektif dalam operasional sehari-hari, tetapi juga lebih adaptif dan tahan terhadap tekanan eksternal, karena setiap orang merasa didengar dan dihargai dalam proses bersama.²¹ Situasi seperti ini membuka kesempatan bagi terciptanya dialog yang terbuka, jujur, dan konstruktif, sehingga memudahkan anggota untuk bersama-sama mencari solusi terbaik atas berbagai masalah yang muncul. Dengan komunikasi yang bebas dan transparan, hubungan antar anggota menjadi lebih kuat karena tumbuh rasa saling percaya. Ruang diskusi yang sehat membantu meminimalkan kesalahpahaman, sementara setiap keputusan yang diambil menjadi lebih matang,

²¹ Bernhard Tewel, *Perilaku Organisasi* (Bandung: CV Patra Media Grafindo, 2017), 191.

informatif, dan didukung oleh seluruh pihak. Lebih dari itu, organisasi yang secara konsisten menerapkan komunikasi terbuka cenderung lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan serta tantangan yang datang. Mereka mampu menemukan ide-ide baru, berinovasi, dan menyesuaikan strategi dengan cepat tanpa menimbulkan konflik internal. Pada akhirnya, komunikasi terbuka bukan sekadar alat untuk berbicara, tetapi juga fondasi yang memperkuat kerja sama, membangun transparansi, dan menumbuhkan budaya saling mendukung di dalam organisasi secara berkelanjutan.

c. Penyelesaian konflik

Manajemen konflik adalah strategi kunci untuk mempertahankan keharmonisan dan stabilitas dalam organisasi maupun komunitas. Konflik memang tak terhindarkan, tapi cara penanganan dan penyelesaiannya menentukan keberhasilan kelompok. Pendekatan yang tepat bisa mengubah ketegangan menjadi peluang pertumbuhan dan kerja sama yang lebih solid.²² Strategi manajemen konflik sebenarnya merupakan fondasi penting dalam menjaga keharmonisan suatu kelompok atau organisasi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali masalah sejak awal, sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Dengan pemahaman yang tepat terhadap akar masalah, pihak terkait bisa

²² Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Depok: Rajawali Pres, 2021), 220.

mengambil tindakan yang lebih efektif. Selain itu, membangun komunikasi yang terbuka antara semua pihak sangat krusial agar setiap suara terdengar dan tidak ada kesalah pahaman yang menumpuk. Selanjutnya, teknik mediasi dan negosiasi menjadi alat penting untuk mencapai penyelesaian yang damai dan adil. Mediasi membantu menghadirkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi diskusi, sedangkan negosiasi memungkinkan semua pihak mencari titik temu yang saling menguntungkan. Penanganan konflik yang dilakukan dengan baik bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat hubungan antar anggota. Proses ini juga menjadi kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan yang sebelumnya rusak. Dengan penyelesaian yang transparan, inklusif, dan melibatkan semua pihak, anggota organisasi belajar menghargai perbedaan, memahami perspektif orang lain, serta meningkatkan kualitas komunikasi. Hasilnya, konflik serupa di masa depan dapat dicegah, dan organisasi pun menjadi lebih solid, adaptif, serta harmonis dalam menghadapi dinamika internal maupun eksternal.

d. Mendorong Partisipasi Aktif

Mendorong partisipasi aktif menjadi strategi krusial dalam sebuah organisasi atau komunitas, karena bertujuan agar setiap anggota merasa diperhatikan, dihargai, dan memiliki peran dalam

kehidupan bersama. Partisipasi aktif tidak sekadar hadir secara fisik, melainkan melibatkan keterlibatan nyata melalui penyampaian ide, pemberian energi, serta komitmen dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Dengan demikian, setiap anggota bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga kontributor yang membangun dan menjaga keberlangsungan komunitas. Strategi ini juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama, meningkatkan solidaritas, dan memastikan bahwa setiap suara memiliki dampak nyata dalam kemajuan organisasi atau komunitas tersebut.²³ Strategi ini berperan penting dalam memperkuat praktik demokrasi di dalam organisasi dengan mendorong pengambilan keputusan secara kolektif. Dengan melibatkan berbagai perspektif dari anggota, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif dan representatif. Selain itu, partisipasi aktif anggota menumbuhkan rasa kebersamaan serta tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai bersama. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membantu meminimalkan potensi konflik internal. Secara keseluruhan, strategi semacam ini memperkuat solidaritas antaranggota, membangun budaya kerja yang harmonis, dan menciptakan lingkungan organisasi yang lebih transparan, adil, dan efektif dalam mencapai tujuan bersama.

²³ Marniati, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Alfabeta, 2020), 94-95.

e. Evaluasi

Evaluasi adalah tahap penting dalam manajemen strategis yang berfungsi menilai sejauh mana strategi yang diterapkan berhasil dan efektif. Proses ini dilakukan secara berkala untuk mengukur pencapaian tujuan strategis, sekaligus mendeteksi kendala yang muncul selama pelaksanaan. Selain itu, evaluasi membantu mengidentifikasi peluang perbaikan, penyempurnaan, dan penyesuaian strategi agar lebih optimal di masa depan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya sekadar menilai hasil, tetapi juga menjadi alat refleksi dan pembelajaran organisasi untuk meningkatkan kinerja, meminimalkan risiko, dan memastikan setiap langkah strategis lebih selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.²⁴ Proses evaluasi sistematis juga memberikan kesempatan bagi organisasi atau pemimpin untuk belajar dari pengalaman, sehingga mereka dapat terus meningkatkan dan menyempurnakan strategi yang akan diterapkan di masa mendatang.

3. Unsur-Unsur Strategi

Unsur-unsur strategi adalah komponen dasar yang wajib agar suatu strategi dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara efektif. Unsur-unsur ini meliputi tujuan sebagai arah yang diinginkan, kebijakan sebagai pedoman pengambilan keputusan, program sebagai perwujudan

²⁴ Ayi Ahadiyat, *Manajemen Strategi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 5405).

konkret dari rencana yang akan diimplementasikan, sumber daya yang digunakan untuk mendukung implementasi strategi, dan taktik sebagai langkah-langkah teknis yang secara langsung terlibat dalam implementasinya.²⁵

4. Peran Strategi

Strategi memainkan peran penting dalam membimbing suatu organisasi atau masyarakat menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Melalui strategi, arah yang diinginkan menjadi lebih jelas, berbagai elemen dalam sistem kerja dapat diintegrasikan secara terkoordinasi, dan langkah-langkah yang diambil dapat disesuaikan dengan perubahan dan dinamika di lingkungan eksternal.²⁶

5. Fungsi Strategi

Fungsi utama strategi adalah menjadi panduan dalam merancang dan menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara jelas dan terarah. Strategi membantu menyelaraskan kegiatan di seluruh divisi organisasi sehingga semua pihak bergerak sejalan. Selain itu, strategi berperan sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi, sekaligus menjadi pedoman untuk pengambilan keputusan saat menghadapi situasi yang kompleks. Dengan adanya strategi, setiap tindakan menjadi lebih fokus dan sistematis, meminimalkan kesalahan, serta

²⁵ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 102.

²⁶ J. Winardi, *Manajemen Strategik* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 45.

memaksimalkan potensi hasil. Pada akhirnya, strategi memastikan bahwa seluruh upaya organisasi terkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Secara umum, strategi dibuat untuk memastikan bahwa rencana diimplementasikan seefektif mungkin.

Enam Fungsi strategi adalah sebagai berikut:

- a. Mengkomunikasikan visi organisasi yang jelas kepada semua pihak
- b. Mengintegrasikan serta memanfaatkan kekuatan dan keunggulan organisasi.
- c. Menggunakan hasil atau keberhasilan masa lalu sebagai referensi untuk menentukan langkah selanjutnya
- d. Menganalisis dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia saat ini.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas organisasi untuk menjaga keselarasan dan fokus.
- f. Menanggapi perubahan atau tantangan yang muncul dengan tepat.²⁷Peran strategi dalam organisasi dan kepemimpinan memegang posisi yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Strategi berfungsi sebagai panduan utama untuk menghadapi berbagai tantangan, baik yang muncul dari internal maupun eksternal organisasi. Dengan adanya strategi yang matang, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal, mengurangi risiko

²⁷ Roni Anggara Adiatma, *Manajemen Strategi* (Bandung: Ikapi, 2019), 5-6.

kesalahan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, strategi juga menjadi alat untuk menjaga keberlanjutan operasional melalui perencanaan yang terarah dan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kepemimpinan yang efektif selalu berpadu dengan strategi yang tepat agar tujuan organisasi tercapai secara konsisten dan berkelanjutan.

B. Pemimpin Gereja

Secara etimologis, kata pemimpin berasal dari bahasa Inggris *to lead* yang berarti mengarahkan atau menuntun. Dari kata dasar tersebut kemudian muncul istilah *leader*, yaitu individu yang berperan sebagai orang yang memimpin. Selain itu, berkembang pula istilah *leadership* yang merujuk pada gagasan, proses, maupun kemampuan yang berkaitan dengan kegiatan memimpin dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, pemimpin bukan sekadar posisi formal, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengarahkan, membimbing, dan memengaruhi orang lain. Leadership mencakup keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, serta kemampuan memotivasi dan menginspirasi bawahan atau komunitas, sehingga tujuan bersama dapat dicapai secara efektif dan harmonis.²⁸ Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memainkan peran

²⁸ A.M. Mangunhardjana, *Kepemimpinan* (Yogyakarta: Kanasius, 1976), 11.

utama.²⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin didefinisikan sebagai seseorang yang menjalankan peran kepemimpinan atau individu yang ditunjuk untuk memimpin.³⁰ Dengan demikian pemimpin adalah seseorang yang diberi wewenang dalam suatu organisasi, dan pencapaian tujuan organisasi bergantung pada kualitas pemimpin tersebut.

1. Landasan Teologis Pemimpin Gereja

Pemimpin gereja didasarkan pada panggilan Tuhan. Tuhan, yang berdaulat atas seluruh umat manusia, berhak untuk menunjuk, memilih, memanggil, menguduskan, dan memperlengkapi siapa pun yang Dia kehendaki untuk kemuliaan nama-Nya. Mengenai dasar panggilan ini, Yakob Tomatala mengatakan seorang pemimpin gereja ialah orang yang secara khusus dipanggil untuk memimpin, yang dicirikan oleh kemampuan dan tanggung jawab sebagai karunia dari Tuhan, untuk membimbing umat kepemimpinan-Nya (gereja) dalam mencapai tujuan melalui dan bersama komunitas.³¹ Tanda-tanda panggilan ini terlihat jelas dalam kesadaran bahwa Tuhan telah menganugerahinya kemampuan untuk memimpin, baik secara organisasi maupun dalam membangun persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Secara teologis, panggilan seorang pemimpin gereja berakar pada prinsip menjadi hamba atau pelayan Allah, sebagaimana diajarkan dalam Markus 10:42-45. Seorang

²⁹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* (Jakarta: Pusaka Amani), 229.

³⁰ Timpenyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pusaka, 2001), 874.

³¹ Yakob Tomatala, *Kepemimpinan Dinamis* (Malang: Gandum Mas, 1997).

pemimpin tidak memimpin untuk kekuasaan atau keuntungan pribadi, melainkan untuk melayani dengan rendah hati, memikul tanggung jawab demi kepentingan jemaat dan kehendak Allah. Peran ini merupakan wujud kepercayaan Allah, yang menempatkan pemimpin sebagai pengurus rohani yang membimbing, menegur, dan mendukung jemaat dalam iman. Kepemimpinan gereja sejati tercermin dalam pelayanan yang tulus, konsisten, dan penuh kasih, menjadikan pemimpin sebagai cermin nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan komunitas. Oleh karena itu, landasan utama untuk menjalankan kepemimpinan gereja harus berakar pada hubungan yang hidup dengan Allah, yang kemudian diwujudkan melalui hubungan yang harmonis dengan jemaat sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian.

Para pemimpin gereja, dari perspektif Perjanjian Lama, dapat dipahami melalui dua dimensi utama: sebagai pemimpin nasional dan sebagai pemimpin umat. Sepanjang sejarah Israel, pola kepemimpinan terlihat jelas sejak zaman tokoh-tokoh seperti Musa, Yosua, dan para hakim, hingga periode kerajaan yang dimulai oleh Raja Saul. Pada fase awal kerajaan, tiga raja besar—Saul, Daud, dan Salomo—memerintah Israel sebagai satu kesatuan di bawah satu pemerintahan. Setelah masa pemerintahan Salomo berakhir, kerajaannya tidak lagi bersatu. Kerajaan yang tadinya tunggal akhirnya terpecah menjadi dua bagian. Bagian utara dikenal sebagai kerajaan Israel dengan pusat pemerintahan di

Samaria, sedangkan bagian selatan menjadi kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem. Pemisahan ini menandai perubahan besar dalam sejarah bangsa Israel, baik secara politik maupun sosial. Setiap kerajaan kemudian mengembangkan identitas dan pemerintahan masing-masing, menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Perpecahan ini juga memengaruhi kehidupan rakyat sehari-hari, hubungan antar suku, serta dinamika keagamaan, membentuk sejarah panjang yang penuh konflik dan transformasi. Dalam studi tentang kepemimpinan Israel menurut Perjanjian Lama, perhatian khusus diberikan pada sosok Musa sebagai pemimpin utama. Mengenai kepemimpinan Musa, Andrew Murray menjelaskan bahwa istilah "manusia Allah" memiliki makna yang mendalam, merujuk pada seseorang yang berasal dari Allah, dipilih oleh-Nya, dan diutus untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kehendak-Nya.³²

Musa dipahami sebagai seorang pemimpin diutus oleh Allah sendiri. Ia hidup dibimbing oleh kemuliaan-Nya, yang memungkinkannya untuk membimbing umat Allah semakin dekat kepada Allah. Semua ini terjadi karena Allah berdiam di dalam hati Musa yang tulus. Oleh karena itu, setiap pemimpin gereja harus dimotivasi oleh roh seorang hamba Allah, yang Mendedikasikan seluruh hidupnya untuk

³² Andrew Murray, *Pembaharuan Hari Demi Hari Bagi Orang Percaya* (Batam: Interaksara, 2011), 39.

melayani dan memuliakan Tuhan. Seorang pemimpin yang membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan harus memiliki otoritas spiritual dan mengalami kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidupnya, yang lahir dari hubungan pribadi yang erat dengan-Nya, seperti yang terlihat dalam kehidupan Musa. Lebih lanjut, Musa juga mampu memengaruhi Yosua dan mempersiapkannya untuk menggantikannya sebagai pemimpin bangsa Israel. Hal ini dimungkinkan karena otoritas ilahi yang nyata dalam dirinya. Sebagai seorang pemimpin, Musa tidak hanya memimpin tetapi juga melengkapi kader-kader untuk melanjutkan peran kepemimpinan di masa depan.

Mengenai panggilan Musa, dapat dipahami bahwa ia tidak hanya dibekali dengan keterampilan teknis melalui pendidikan dan pertumbuhannya di Mesir, tetapi yang terpenting, ia dibentuk menjadi seorang pemimpin yang hebat melalui kesetiaannya dalam mengikuti Tuhan dengan iman.³³

Musa merupakan sosok yang dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin umat-Nya. Walaupun ia telah dipersiapkan secara khusus untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, perjalanannya sebagai pemimpin tidaklah mudah karena harus melewati proses yang panjang serta menghadapi berbagai tantangan. Terkait

³³ *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid II* (Jakarta: Yayasan Bina Komunikasi Bina Kasih, 1997), 107.

dengan perannya dalam menyiapkan generasi penerus, *Ensiklopedia Alkitab Kontemporer* volume II menjelaskan bahwa pada masa eksodus, Yosua masih tergolong muda (Keluaran 33:11). Selanjutnya, Musa mengangkat Yosua sebagai pembantu dekatnya serta mempercayakan kepadanya tanggung jawab untuk mengatur dan memimpin pasukan dari suku-suku Israel yang belum terorganisir dalam menghadapi serangan bangsa Amalek.³⁴ Musa telah memilih dan melatih Yosua sejak eksodus bangsa Israel dari Mesir. Ketika Musa naik seorang diri ke Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan, Yosua menunjukkan kesetiaan dengan tetap menanti di Kemah Pertemuan sebagaimana dicatat dalam Keluaran. Kesetiaan ini menggambarkan komitmennya kepada panggilan ilahi dan kepada pemimpinnya. Kemudian, di wilayah dataran dekat Sungai Yordan, Yosua secara resmi ditetapkan sebagai penerus Musa untuk memimpin bangsa Israel. Penetapan tersebut bukanlah hal yang tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang. Selama empat puluh tahun, Musa dengan sabar mengajar, melatih, serta membentuk karakter Yosua agar siap memikul tanggung jawab besar dalam memimpin umat menuju masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka di kemudian hari nanti semua.

³⁴ Ibid,277.

2. Pemimpin Gereja Menurut Alkitab Perjanjian Baru

Menurut ajaran Perjanjian Baru, proses pengangkatan pemimpin gereja pada dasarnya serupa dengan pola dalam Perjanjian Lama. Namun, ada perbedaan dalam bentuk dan peran kepemimpinan. Pada era Perjanjian Baru, kepemimpinan tidak lagi berpusat pada imam dan nabi, tetapi lebih diwujudkan melalui Yesus Kristus, para rasul, uskup, penatua, dan gembala. Selama hidup dan pelayanan-Nya, Yesus Kristus memanggil, memilih, melatih, dan menugaskan dua belas rasul untuk melaksanakan tugas yang telah Dia percayakan kepada mereka, yaitu Amanat Agung, seperti yang tercatat dalam Matius 28:18–20. Setelah kenaikan-Nya, Dia juga menunjuk dan menugaskan Paulus sebagai rasul, khususnya sebagai pelayan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam membahas kepemimpinan gereja pada era Perjanjian Baru, fokus utamanya adalah pada teladan kepemimpinan Yesus Kristus dan Paulus. Kepemimpinan gereja pada periode ini berfokus dan berpusat pada pribadi Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Kehidupan, sifat, teladan, visi, dan pelayanan-Nya terus menjadi landasan serta pedoman penting bagi pelayanan gereja sampai masa kini. Berkaitan dengan pribadi Yesus Kristus sebagai contoh utama, Peter Octavianus menyampaikan bahwa pemimpin yang paling mampu memperkaya hidup orang lain, termasuk para pemimpin di dunia, adalah Yesus Kristus. Menurut pandangannya, seluruh kualitas unggul serta sikap ideal yang dibutuhkan dalam

kepemimpinan manusia telah dinyatakan secara sempurna di dalam diri-Nya, sehingga Ia menjadi model kepemimpinan yang utuh, relevan, dan layak diteladani oleh setiap orang yang terpanggil untuk memimpin serta melayani sesama dengan kasih dan tanggung jawab yang benar serta penuh komitmen dalam setiap tugas.³⁵

Oleh karena itu, kualifikasi utama seorang pemimpin rohani terletak pada ketergantungannya terhadap pembentukan kepribadian, kedewasaan spiritual, kekuatan mental, serta karakter sosial yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, aspek seperti kewibawaan, kemampuan intelektual, pengetahuan, dan kebijaksanaan juga menjadi unsur pendukung yang penting. Seorang pemimpin gereja dituntut untuk menghadirkan seluruh nilai kehidupan Kristus dalam dirinya melalui Roh Kudus, ia dapat dalam pelayanannya menuntun orang lain untuk mengenal dan mendekat kepada Tuhan Yesus.

Dalam hidup-Nya, Yesus menjadi contoh bagi para pemimpin gereja maupun calon pemimpin. Menurut Jerry C. Worffod, Yesus menunjukkan contoh nyata melalui proses pelayanan. Ia melakukan semua ini langsung di hadapan kedua belas murid-Nya, memungkinkan mereka untuk belajar melalui pengalaman nyata dan pengamatan langsung terhadap kehidupan, pelayanan, dan tindakan-Nya. tidak hanya

³⁵ Petrus Oktavianus, *Manajemen Dan Kepemimpinan Menurut Wahyu Allah* (Malang: YPPPII, 1997), 191.

mendengar ajaran-Nya, tetapi juga menyaksikan mukjizat yang dilakukan-Nya, mendengar doa-doa-Nya, bahkan melihat penderitaan-Nya ketika disalibkan.³⁶ Ini berarti bahwa, di bawah pelayanan dan kepemimpinan Tuhan Yesus, para murid tidak hanya diajar, tetapi juga dilatih, diberdayakan, dan karunia mereka dikembangkan, sehingga mereka siap untuk melanjutkan kunjungan dan pelayanan-Nya. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan pengetahuan kepada murid-murid-Nya tetapi juga memberikan teladan melalui karakter yang baik.

3. Pendeta sebagai pemimpin gereja

Kata "reverend," secara etimologis berasal dari kata Sanskerta "pandita," merujuk pada seorang brahmana atau guru dalam tradisi Hindu dan Buddha. Dalam konteks Indonesia, istilah ini (dikenal dalam bahasa Inggris sebagai "The Reverend") digunakan untuk merujuk pada para pemimpin dalam Kekristenan Protestan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seorang reverend adalah orang yang berpengetahuan luas yang hidup sebagai seorang pertapa, dan bertindak sebagai pemimpin atau pemimpin jemaat, seorang rohaniwan, dan seorang guru agama.³⁷

Seorang pemimpin gereja yang benar-benar dipilih dan dipanggil oleh Tuhan akan memancarkan kasih yang berasal dari Tuhan sendiri.

³⁶ Jerry C. Woffrod, *Kepemimpinan Kristen Yang Mengubah* (Yogyakarta: Yayasan Andi, 2001), 28.

³⁷ <http://kbbi.> "Web.Id," "Pendeta."

Kepemimpinan yang diinginkan Tuhan tidak hanya berfokus pada pencapaian visi, penegakan aturan, atau pencapaian kesuksesan, tetapi juga pada hati yang penuh kasih. Sebagai wakil Tuhan, seorang pemimpin spiritual harus menunjukkan kasih dan rasa hormat kepada semua orang, termasuk mereka yang dipimpinnya. Ketika seorang pemimpin memiliki belas kasih, mereka akan mampu menghargai setiap orang—baik dalam pikiran, pendapat, maupun aspirasi mereka. Seorang pemimpin yang penuh kasih juga akan melindungi, membimbing, dan merawat semua anggota jemaatnya. Dengan demikian, kasih adalah landasan utama untuk membangun kepemimpinan yang selaras dengan firman Tuhan.³⁸

C. Politik

Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis*, yang merujuk pada kota atau negara-kota sebagai pusat kehidupan masyarakat.³⁹ Dari istilah tersebut kemudian muncul kata *politeia* yang digunakan untuk menggambarkan tatanan kehidupan sosial serta sistem pemerintahan yang berlaku di negara-kota pada masa Yunani kuno.⁴⁰ Dalam konteks itu, warga negara memiliki peran penting karena mereka tidak hanya menjadi penduduk, tetapi juga terlibat aktif dalam proses interaksi,

³⁸ Andar Budiani, "ADMINISTRASI GEREJA MEMBANTU PEMIMPIN GEREJA DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN GEREJA," *Jurnal Pendidikan dan Humaniora* 1, no. No.3 (2022), 53-58.

³⁹ Hidajat Imam, *Teori-Teori Politik* (Malang: Setara, 2009), 2.

⁴⁰ Erman S. Saragih, *Penatalayanan Gereja Dalam Politik Praktis* (Daskein, 2016), 2.

musyawarah, dan kerja sama. Partisipasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, harmonis, dan berorientasi pada tercapainya kebaikan umum bagi seluruh anggota komunitas yang mereka jalani secara kolektif bersama.⁴¹ Politik, sebagaimana berkembang dalam konteks Yunani pada waktu itu, dapat dipahami sebagai proses hubungan dan interaksi antar individu yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Lebih jauh lagi, politik juga didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan, baik melalui saluran yang sah sesuai dengan konstitusi maupun di luar mekanisme tersebut.⁴²

Pemikiran politik, khususnya dalam tradisi Barat, sebagian besar dibentuk oleh filsafat Yunani Kuno. Tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles memandang politik sebagai upaya untuk menciptakan tatanan sosial terbaik dan paling ideal.⁴³ Menurut Aristoteles, aspek politik kehidupan manusia sangat penting karena memengaruhi berbagai dimensi kehidupan lainnya. Ia juga berpendapat bahwa politik berkaitan dengan mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.⁴⁴ Tetapi, definisi politik yang dikemukakan oleh para filsuf ini belum sepenuhnya menjelaskan aspek praktis dari mewujudkan pemerintahan yang ideal.

⁴¹ Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2011), 2.

⁴² Adolf Bastian Simamora, "POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2 (2019), 3.

⁴³ Budiarto Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2007), 14.

⁴⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1992), 1.

Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa pemikiran politik kontemporer tetap dipengaruhi oleh gagasan para filsuf ini. Dalam kerangka teori politik modern, politik dipahami sebagai wujud kekuasaan yang dimiliki negara dan dijalankan melalui partai politik sebagai perantara dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, terutama dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, dalam negara demokratis, politik biasanya diartikan sebagai usaha untuk meraih dan melaksanakan kekuasaan di lembaga legislatif maupun eksekutif. Singkatnya, politik kerap dikaitkan erat dengan konsep kekuasaan.⁴⁵

Sejak abad ke-16 hingga awal abad ke-20, pemahaman tentang politik mengalami penyempitan makna jika dibandingkan dengan pandangan luas yang pernah berkembang pada masa Yunani Kuno. Pada periode tersebut, politik lebih sering dipahami secara terbatas sebagai urusan kekuasaan negara dan pemerintahan saja, bukan sebagai pembahasan menyeluruh mengenai kehidupan bersama masyarakat. Dalam konteks perkembangan pemikiran itu, Jean Bodin, seorang pemikir asal Prancis, memperkenalkan istilah "ilmu politik" sebagai cabang pengetahuan yang mempelajari kekuasaan dan tata kelola negara. Gagasannya membantu membentuk dasar kajian modern yang kemudian berkembang di berbagai negara dan lembaga pendidikan hingga menjadi disiplin akademik yang diakui secara luas di dunia modern. Lebih lanjut, Montesquieu menjelaskan bahwa semua fungsi

⁴⁵ Gunche Lugo, *Manifesto Politik Yesus* (Yogyakarta: ANDI, 2009), 42.

pemerintahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama: legislatif, eksekutif, dan yudisial. Dengan demikian, politik dapat diartikan sebagai aktivitas kolektif dalam suatu negara yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama melalui berbagai proses politik yang disepakati. Di sisi lain, istilah "politik praktis" merujuk pada realitas di mana berbagai kepentingan, motif, dan niat bertemu dan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Secara lahiriah, kekuasaan ini tampak sebagai posisi atau gelar, tetapi lebih dalam lagi, yang diperebutkan adalah otoritas dan kekuasaan untuk menentukan kebijakan publik. Politik praktis juga sering dikaitkan dengan praktik politik uang, yang biasanya terjadi ketika individu atau kelompok mencoba untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan melalui cara-cara tertentu.⁴⁶ Faktanya, beberapa individu dalam politik menggunakan media sebagai sarana untuk terlibat dalam aktivitas politik, seperti menyebarkan hoaks. Tujuan penyebaran hoaks ini adalah untuk memengaruhi dan memanipulasi opini publik demi kepentingan mereka sendiri, dan pada akhirnya menggunakannya sebagai alat untuk melemahkan lawan politik. Tidak hanya itu, penyebaran informasi palsu dalam konteks politik praktis memiliki potensi besar menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Fenomena ini dapat melemahkan rasa persatuan, merusak kepercayaan antarwarga, serta mengancam keutuhan

⁴⁶ MUH. IN'AMUZZAHIDIN, "ETIKA POLITIK DALAM ISLAM," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* (2016), 90.

dan integritas bangsa. Jika tidak diantisipasi dengan baik, dampaknya bisa meluas dan menimbulkan konflik sosial berkepanjangan.⁴⁷

Hal tersebut memperlihatkan bahwa individu yang memegang otoritas biasanya adalah pihak yang mampu mengatur dan memanfaatkan kekuasaan secara efektif, karena dengan kendali atas kekuasaan itu mereka memiliki peluang besar untuk melemahkan, menyingkirkan, atau bahkan menjatuhkan para pesaing maupun lawan politik yang dianggap mengancam posisi mereka dalam struktur kekuasaan yang ada.⁴⁸ Agama memiliki hubungan yang sangat dekat dengan aktivitas politik yang dijalankan oleh para pelaku politik. Dalam situasi tertentu, nilai dan simbol keagamaan kerap dimanfaatkan secara strategis untuk memengaruhi dukungan publik, membangun legitimasi, serta dijadikan instrumen politik guna meraih dan mempertahankan kekuasaan yang diinginkan oleh kelompok tertentu dalam kepentingan politik praktis.⁴⁹

Menurut pandangan Johannes Calvin, otoritas pemerintahan sipil seharusnya tidak mencampuri urusan yang khusus berkaitan dengan kehidupan internal Gereja. Meskipun demikian, ia juga menolak gagasan kelompok radikal yang beranggapan bahwa umat Kristen tidak lagi

⁴⁷ Moh. Abu Na'im, "HOAKS Sebagai Konstruksi Sosial Untuk Kepentingan Politik Praktis Dalam Pilgub DKI Jakarta," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* (2017), 82.

⁴⁸ Bayu Mitra Adhyatma Kusuma and Theresia Octastefani, "Orang Kristen Dan Politik: Belajar Dari Kasus Salomo Dan Adonia Dalam Persaingan Menuju Takhta," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* (2019), 5-6.

⁴⁹ Ronny Winarno, "ARTI PENTING NILAI-NILAI DAN NORMA HUKUM DALAM BERPOLITIK PRAKTIS," *Perspektif* (2015): 82,"

memerlukan keberadaan negara sebagai bagian dari tatanan dunia yang tetap diperlukan bagi kehidupan sosial dan keteraturan masyarakat umum.⁵⁰ Karena dunia lama belum sepenuhnya lenyap, keberadaan pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang perlu dan bahkan sebagai anugerah dari Tuhan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Menurut Johannes Calvin, mereka yang menolak keberadaan pemerintah dan negara menunjukkan kurangnya pemahaman tentang realitas dunia yang masih didominasi oleh dosa. Lebih jauh lagi, sikap-sikap ini juga mencerminkan pengabaian terhadap ketentuan Tuhan yang dimaksudkan untuk melindungi orang benar dari kejahatan.

Meskipun Johannes Calvin menekankan pentingnya negara selama gereja masih ada di bumi, ia tidak bermaksud menyerahkan semua aspek kehidupan kepada pemerintah. Ia dengan jelas membedakan antara gereja dan negara, atau dalam bahasa sehari-hari pada zamannya, antara pemerintahan spiritual dan pemerintahan duniawi (politik). Dalam hal ini, Johannes Calvin menekankan bahwa baik gereja maupun negara menerima mandat yang berbeda dari Tuhan. Pembagian peran ini dimaksudkan untuk mencegah konflik antara keduanya.

Dengan demikian, dalam teologi Johannes Calvin, hubungan antara gereja dan negara sangat erat namun tetap berdampingan. Keduanya

⁵⁰ Christian de Jonge, *Apa Itu Calvinisme?* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 268.

memiliki peran masing-masing dalam melaksanakan kehendak Tuhan dan menjaga kehormatan-Nya.⁵¹

Namun, ini tidak berarti bahwa negara memiliki hak untuk mengambil alih semua peran dan fungsi gereja, atau sebaliknya. Pandangan ini berakar pada cita-cita pemerintahan teokratis Johannes Calvin. Untuk mewujudkan teokrasi ini, pemberitaan Firman oleh gereja saja tidak cukup; semua aspek kehidupan—baik individu maupun masyarakat—harus diatur sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam konteks ini, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung peran gereja. Hal ini didasarkan pada pandangan positif Johannes Calvin tentang negara. Ia menolak gagasan bahwa gereja harus tunduk kepada negara, atau sebaliknya. Sebaliknya, ia menekankan koeksistensi (kesetaraan) dan kerja sama antara gereja dan negara.

⁵¹ Th. Van den End, *Harta Dalam Bejana* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 188.